

1 BAB I

2 PENDAHULUAN

2.1 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik yang terjadi antara dua negara tentu dapat meningkatkan keuntungan antara kedua belah pihak negara dan berjalan dengan lancar. Tetapi, yang terjadi antara Indonesia dan Jepang tidak langsung mendatangkan keuntungan terutama bagi pihak Indonesia. Hubungan diplomatik yang terjadi secara resmi antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1958 tidak berlangsung begitu saja, sebelum menandatangani hubungan secara resmi, pihak Indonesia dan Jepang membutuhkan waktu hingga tujuh tahun sebelum berhasil diresmikan. Penandatanganan hubungan diplomatik yang bersamaan dengan penandatanganan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang.

Pampasan perang merupakan sebuah biaya yang harus dibayarkan oleh Jepang sebagai pihak yang kalah dalam perang kepada negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Pembicaraan tentang teknis pembayaran biaya pampasan perang diwadahi dalam sebuah persetujuan pampasan perang. Indonesia dan Jepang saling mengajukan proposal terkait dana yang akan didapatkan oleh Indonesia. Persetujuan pampasan perang menjadi salah satu penghambat bagi Indonesia dan Jepang melakukan hubungan diplomatik secara resmi. Persoalan ini baru dapat diatasi ketika PM Jepang Kishi berkunjung ke Indonesia pada tahun 1957 (Bandaro, 1994, hal. 98).

Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, serta hubungan Jepang dengan Amerika Serikat, menjadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia dan Jepang. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dan Jepang, dapat merekatkan kembali hubungan kedua negara dalam sebuah perjanjian bernama perjanjian San Francisco. Perjanjian San Francisco terjadi pada tahun 1951, perjanjian ini difasilitasi oleh Amerika Serikat. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah terjalin sejak tahun 28 Desember 1949,

maka tidak heran apabila peranan Amerika Serikat sangat besar dalam perjanjian ini, hal tersebut ditunjukkan oleh keputusan pemerintahannya untuk mengirim menteri luar negerinya guna menghadiri konferensi damai dengan Jepang di San Francisco (Leifer, 1989, hal. 48). Senada dengan yang dikatakan Hendri F dalam blog historia bahwa :

“ Pada pertengahan tahun 1951, Amerika Serikat memprakarsai suatu pertemuan di San Francisco untuk merundingkan Perjanjian Damai dan Pampasan Perang dengan Jepang –lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco, yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II (Isnaeni, 2010).”

Jadi secara tidak langsung berkat Amerika Serikatlah hubungan Indonesia dan Jepang kembali terjalin setelah kemerdekaan dan sempat renggang karena luka penjajahan yang diakibatkan oleh Jepang. Perjanjian San Francisco mengharuskan Jepang untuk membayar Pampasan Perang kepada negara di Asia Tenggara sebagai ganti rugi. Jepang berkewajiban untuk membayar biaya kerugian perang karena Jepang menjadi pihak yang kalah dalam perang dunia II bersama dengan Jerman dan Italia.

Konferensi Perdamaian San Francisco menawarkan kepada pihak Jepang suatu kesempatan untuk mendapatkan kembali posisinya di kalangan masyarakat internasional setelah pendudukan sekutu (Nishihara M. , 1944, hal. 52). Hal tersebut tentu dibutuhkan oleh Jepang untuk membangkitkan kembali eksistensinya pasca kalah perang di perang dunia II. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan mentah dan Jepang merupakan suatu negara membutuhkan bahan-bahan itu untuk industrinya (Bandaro, 1994, hal. 98). Jadi dapat dikatakan Jepang memiliki tujuan lain untuk mendukung tujuannya.

Pasca perjanjian San Francisco disetujui, dilakukan negosiasi mengenai pampasan perang berlangsung antara tahun 1951 sampai dengan 1958 melalui saluran-saluran resmi dan non resmi yang dikenal dengan saluran “ lobi perdamaian” (Suradjaja, 2012, hal. 332). Baik Indonesia maupun Jepang awalnya menolak kembali berhubungan karena Indonesia masih merasa sakit hati terhadap Jepang dan sensitifitas terhadap pihak asing. Selain itu, konflik yang terjadi antar

partai besar terjadi di Indonesia, pihak yang setuju salah satunya dari partai Masyumi dan yang tidak setuju salah satunya dari partai PNI. Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan diskusi, akhirnya pemerintah bersedia hadir jika ada manfaatnya bagi Indonesia (Soesastro, 2005). Namun yang jadi pertanyaan adalah mengapa pada waktu itu Indonesia tetap menghadiri konferensi perdamaian San Francisco meskipun di Indonesia sendiri masih terjadi perdebatan.

Pihak Jepang juga awalnya menolak karena tidak merasa pernah bertempur secara langsung dengan pihak Indonesia. Selain itu, setelah Perang Dunia ke-II berakhir, Jepang kembali menjadi negara Asia demokratis yang cinta damai. Rakyat Jepang, yang telah mengalami kesengsaraan perang, terutama setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki menginginkan adanya perdamaian (Tokyo, Internasional Society for Education Information, 1971, hal. 25). Kedamaian yang diinginkan oleh rakyat Jepang menjadi titik balik bagi Jepang untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain.

Perundingan mengenai pembayaran Pampasan perang akhirnya disetujui pada 20 Januari 1958. Lamanya perundingan ini sendiri disebabkan karena tidak menemukan titik temu antara keinginan Jepang dan keinginan Indonesia. Dari dana yang diminta sebesar \$17,5 milyar, pada akhirnya dana yang disetujui untuk dibayarkan selama periode dua belas tahun dalam bentuk barang modal dan jasa (Nishihara M. , 1944, hal. 111) dan \$400 juta dalam bentuk pinjaman. Jumlah dana tersebut terbilang jauh dari harapan awal Indonesia tetapi sama dengan dana yang disetujui dengan Filipina. Masih belum jelas apa yang menyebabkan Indonesia menyetujui jumlah yang jauh dari keinginan awal Indonesia. Entah karena hanya ingin jumlah yang sama dengan Filipina atau ada hal lain. Sehingga perlu dilihat bagaimana peran dari pelobi antara kedua belah pihak. Lobi yang seperti apa yang dilakukan sampai menemukan angka \$400 juta.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia harusnya mengalami keuntungan karena mendapat pasokan dana dari Jepang untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya Indonesia justru mengalami banyak

kesulitan. Pembayaran selama dua belas tahun sering kali terhambat, bahkan ketika Indonesia mengalami kesulitan ekonomi Jepang menawarkan bantuan. Hal tersebut terasa aneh, karena pada awalnya Jepang menolak dana yang besar dengan alasan pemulihan perekonomian, tetapi Jepang mampu memberikan pinjaman. selain itu, pampasan perang ini bukan menguntungkan bagi kedua belah pihak tapi hanya menguntungkan pihak Jepang. Banyak pembangunan di Indonesia yang tidak rampung karena kurangnya dana sehingga mengakibatkan inflasi. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan, kemana uang pembayaran dari Jepang dan bagaimana pengalokasian pihak Indonesia terhadap dana yang di dapatkan. Lalu bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia saat mendapatkan uang pampasan perang yang dibayarkan oleh Jepang. Apakah terdapat penyelewengan atau memang dana yang didapatkan tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan besar di Indonesia.

Perundingan Pampasan perang juga lebih banyak menguntungkan pihak Jepang karena mereka justru mendesak pihak Indonesia untuk meningkatkan harga produk Jepang. Pengusaha Jepang banyak melakukan perdagangan ke Indonesia dengan alasan untuk mengembangkan perekonomian Jepang sehingga dapat membayar biaya pampasan perang. Tetapi, perdagangan Indonesia justru banyak di kuasai Jepang. Ditambah lagi, pada saat itu Indonesia yang sedang mengalami Inflasi diberi pinjaman oleh Jepang kemudian Indonesia harus membayar hutangnya dengan memotong dari biaya pampasan perang. Sehingga jumlah uang yang didapatkan Indonesia semakin sedikit dan banyak proyek terbengkalai.

Proyek-proyek pampasan mengandung lebih banyak aspek negatif ketimbang aspek positif. Banyak proyek tak menerima dana cukup untuk menyelesaikannya akibat inflasi di Indonesia, pampasan juga jadi lahan korupsi (Isnaeni, 2010). Jepang seolah dapat memprediksi keadaan yang akan dialami oleh Indonesia sehingga keadaan berbalik justru menguntungkan Jepang, terutama dibidang ekonomi yang pada saat itu masih dalam proses pemulihan pasca peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena perundingan pampasan perang ini

juga Jepang berhasil mendapatkan kepercayaan dan eksistensinya kembali di mata dunia khususnya Asia.

Perundingan pampasan perang terdiri atas satu daftar yang memuat enam kategori program dan proyek, tempat dana pampasan akan digunakan untuk pembangunan (Isnaeni, 2010). Pembayaran pampasan perang di targetkan untuk membangun transportasi, komunikasi, industri, perikanan, pertambangan, serta jasa (Suradjaja., 2012, hal. 337). Dana pampasan perang yang harusnya di pergunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia justru banyak di gunakan untuk membayar pinjaman dan kontrak pampasan perang umumnya dinikmati oleh pengusaha Jepang, sehingga memberikan kesempatan kepada Jepang untuk mengekspansi pasar di Indonesia. Bagaimana aturan dari perundingan pampasan perang ini, apakah ada sanksi atau tidak apabila Jepang melanggar dan berbalik memanfaatkan keadaan Indonesia. Perlu dilihat pula bagaimana pelaksanaan dari perundingan pampasan perang ini, jika ternyata uang pembayaran tidak sesuai dengan harapan dan banyak digunakan untuk pembayaran hutang dan juga dana pampasan perang ini telah habis sebelum waktunya.

Hubungan Indonesia dengan Jepang pada tahun 1951-1970 menjadi suatu hal yang menarik karena diawali oleh perundingan tentang pampasan perang yang cukup panjang. Tahun 1951-1970 dipilih karena pada tahun 1951 merupakan tahun awal bagi Indonesia mulai menjalin kembali hubungan dengan Jepang setelah membeku sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi bisa dibilang tahun 1951 menjadi awal teralinnnya hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang yang ditandai oleh penandatanganan perjanjian San Francisco. Meskipun, hubungan tersebut terjadi karena bantuan Amerika Serikat dan Indonesia dengan Jepang pada awalnya menolak, tetapi pada akhirnya hubungan Indonesia dengan Jepang dapat kembali mencair.

Sementara, tahun 1966 dipilih karena tahun merupakan akhir dari pelunasan pampasan perang dari pihak Jepang. Meskipun dalam kontraknya pembayaran yang dilakukan Jepang kepada Indonesia harusnya berakhir pada

tahun 1970, tetapi pada tahun 1966 uang yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian pampasan perang telah lunas dibayarkan. Hal tersebut terjadi akibat pengelolaan uang yang didapatkan oleh pihak Indonesia kurang baik, jadi banyak uang yang digunakan untuk membayar hutang bukan untuk pembangunan seperti yang telah direncanakan.

Berdasarkan beberapa informasi tentang perundingan pampasan perang juga masalah yang muncul baik sebelum perundingan pampasan perang ataupun setelah perundingan pampasan perang ini maka di buatlah judul : “Pampasan Perang Antara Indonesia dengan Jepang tahun 1951-1966”.

2.2 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat satu permasalahan utama yang akan dikaji yaitu bagaimana penyelesaian pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang tahun 1951-1966 . Untuk mempermudah dan mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis membuat pertanyaan penulisan . Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanyaan Penulisan

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjalinnya kembali hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pampasan perang antara Indonesia dan Jepang ?
3. Bagaimana peran para pelobi dalam keberhasilan pampasan perang ?
4. Bagaimana dampak Pampasan perang bagi Indonesia dan Jepang?

2.3 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memahami hubungan Indonesia dan Jepang terkait pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang dari tahun 1951-1966. Sedang tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang.
2. Menganalisis pelaksanaan pembayaran pampasan perang antara Indonesia dan Jepang.
3. Mendeskripsikan peran para pelobi dalam proses perundingan pampasan perang.
4. Menganalisis dampak dari perjanjian pampasan perang bagi Indonesia dan Jepang.

2.4 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perundingan pampasan perang pada tahun 1951-1966 dari awal hubungan Indonesia dengan Jepang hingga pelaksanaannya. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

Manfaat akademis untuk memperkaya penulisan sejarah hubungan antara Indonesia dengan Jepang pasca kemerdekaan. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai situasi sosial, ekonomi dan politik yang dipengaruhi oleh isu pampasan perang baik dari Indonesia maupun Jepang. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Indonesia, salah satunya adalah perundingan antara Indonesia dengan Jepang yaitu tentang pampasan perang. Masyarakat secara umum diharapkan dapat mengetahui bahwa Indonesia bukan hanya melakukan perundingan dengan Belanda saja tetapi juga dengan Jepang. Masyarakat pada umumnya, belum mengetahui perjanjian pampasan perang yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang. Padahal, perjanjian ini menjadi suatu

perjanjian yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang yang dapat kembali menjalin hubungan diplomatik.

2.5 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi pada umumnya, membutuhkan bantuan dalam penulisannya, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan ini, maka disusunlah struktur organisasi skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan secara terperinci mengenai latar belakang masalah. Dalam bab ini juga penulis akan memaparkan alasan mengapa memilih perundingan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang sebagai materi yang akan diteliti. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai permasalahan-permasalahan apa yang akan dikaji oleh penulis. Akan dijelaskan pula tentang tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tentang perundingan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan kajian penulis. Dalam hal ini teori yang akan digunakan oleh penulis, buku-buku atau literatur yang akan penulis gunakan dan penulisan-penulisan terdahulu yang akan penulis pakai dalam menunjang penulisan skripsi nantinya.

Bab III Metode Penulisan, dalam bab ini penulis diajak untuk mampu menguraikan metode yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan permasalahan penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan secara komprehensif mengenai langkah-langkah serta tahapan-tahapan penulisan yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penulisan mulai dari persiapan hingga penulisan berakhir diuraikan secara terperinci. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam memecahkan masalah mengenai permasalahan yang akan dikaji yakni perundingan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1951-1966.

Bab IV pada bab ini penulis menganalisis serta merekonstruksi data-data serta fakta yang telah ditemukan melalui pencarian sumber dilapangan. Tentu saja pembahasan disini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di

awal. Pada bab ini diuraikan juga mengenai jawaban-jawaban permasalahan penulisan. Hal tersebut, juga merupakan bagian dalam pengolahan hasil penulisan mengenai kajian penulis. Seperti mengetahui latar belakang kembali terjalannya hubungan Indonesia dengan Jepang, proses terjadinya perundingan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang hingga pelaksanaan dari pembayaran pampasan tersebut.

Bab V Simpulan dan Saran, pada dasarnya dalam bab ini dituangkan interpretasi dari penulis setelah menganalisis hasil penulisan di atas. Bab ini bukan merupakan rangkuman dari penulisan, melainkan hasil dari pemahaman penulis dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penulisan.